Realisasi Dana Reses 16 Anggota DPRD NTB Jadi Temuan BPK

TEMUAN RESES

DEWAN

*Ilustrasi*

https://www.bing.com/images/search?

Mataram (Inside Lombok) – Realisasi[[1]](#endnote-1) dana reses 16 anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun anggaran 2020 menjadi bahan temuan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan NTB. Inspektur Provinsi NTB Ibnu Salim di Mataram, Selasa, mengatakan bahwa pihaknya sudah memantau temuan BPK tersebut.

Sesuai dengan aturan, kata Ibnu Salim, mereka diminta menyelesaikan persoalannya itu dalam tempo 60 hari. BPK RI Perwakilan NTB juga memita Sekwan DPRD Provinsi NTB untuk melakukan verifikasi internal. Dari verifikasi internal tersebut, kata dia, hasilnya harus kembali dikonsultasikan kepada BPK RI Perwakilan NTB. Terkait dengan temuan ini, Ketua DPRD Provinsi NTB Baiq Isvie Rupaeda menjelaskan bahwa temuan itu berkaitan dengan pengalihan dana reses untuk pengadaan jaring pengaman sosial (JPS) dewan.

“Jadi, itu reses DPR tidak sesuai dengan ketentuan,” kata Baiq Isvie. Ia menjelaskan bahwa DPRD setempat menyalurkan JPS dewan dengan jumlah anggaran mencapai Rp6,5 miliar. Anggaran itu dipakai untuk pengadaan paket sembako yang satu paketnya bernilai Rp100 ribu.

Adapun perinciannya setiap paket berisi 5 kg beras, 1 kg minyak goreng, dan tujuh bungkus mi instan. Dari jumlah seluruhnya, terkumpul sebanyak 65.000 paket.

Namun, belakangan diketahui anggaran JPS[[2]](#endnote-2) dewan itu berasal dari dana reses. Pengadaannya dibagi sesuai dengan daerah pemilihan masing-masing anggota dewan yang mengadakan JPS dan turut melibatkan peran UMKM mitra DPRD Provinsi NTB. “Harusnya reses itu memberikan makan dan minum. Akan tetapi, ini diganti dengan sembako. Itu yang tidak dibolehkan. Kami sudah komunikasi dan akan kami selesaikan,” ucapnya. (Ant).

**Catatan**

Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.[[3]](#footnote-1) Hasil Pemeriksaan adalah hasil akhir dari proses penilaian kebenaran, kepatuhan, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan data/informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan Standar Pemeriksaan,yang dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan sebagai keputusan BPK.[[4]](#footnote-2)

Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.[[5]](#footnote-3) Selanjutnya Ganti Kerugian adalah sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang harus dikembalikan kepada negara/daerah oleh seseorang atau badan yang telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.[[6]](#footnote-4)

Dengan berlatar belakang dasar hukum UU No 11/2009 tentang Kesejahteraan sosial Jo Perpres No 15/2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, Bansos Program jaring Pengaman Sosial (JPS) memiliki 5 prinsip, yaitu:

1. Tranparansi;
2. Cepat Penyampiannya;
3. Langsung, Tepat Kepada Sasaran Penerima Manfaat;
4. Dapat Dipertanggungjawabakan; dan
5. Patisipatif serta potensial untuk berkelanjutan.[[7]](#footnote-5)

**Sumber Berita**

1. <https://insidelombok.id/berita-utama/realisasi-dana-reses-16-anggota-dprd-ntb-jadi-temuan-bpk/> 23 Desember 2020;
2. <https://www.antaranews.com/berita/1908948/realisasi-dana-reses-16-anggota-dprd-ntb-jadi-temuan-bpk/> 23 Desember 2020;
3. [Realisasi Dana Reses 16 Anggota DPRD NTB Jadi Temuan BPK - Realita Rakyat](https://realitarakyat.com/2020/12/23/realisasi-dana-reses-16-anggota-dprd-ntb-jadi-temuan-bpk/)/ 23 Desember 2020; dan
4. <https://radarlombok.co.id/soal-temuan-bpkkomisi-i-minta-oknum-dewan-bertanggung-jawab.html/> 27 Desember 2020

Endnote/ Catatan Akhir

1. realisasi/re·a·li·sa·si/ /réalisasi/ n 1 proses menjadikan nyata; perwujudan; 2 cak wujud; kenyataan; pelaksanaan yang nyata; [vide: https://www.kbbi.web.id/realisasi] [↑](#endnote-ref-1)
2. JPS adalah Program yang dirancang untuk membantu rakyat miskin yang terkenan dampak krisis ekonomi dan dilaksanakan melalui tahapan penyelamatan dan pemulihan menuju pada kondisi yang normal [ vide: https://pengertianartidefinisidari.blogspot.com/2020/10/jaring-pengaman-sosial-jps-pengertian.html] [↑](#endnote-ref-2)
3. Pasal 1 angka 9 UU 15 Tahun 2006 Tentang BPK [↑](#footnote-ref-1)
4. Pasal 1 angka 14 UU 15 Tahun 2006 Tentang BPK [↑](#footnote-ref-2)
5. Pasal 1 angka 15 UU 15 Tahun 2006 Tentang BPK [↑](#footnote-ref-3)
6. Pasal 1 angka 16 UU 15 Tahun 2006 Tentang BPK [↑](#footnote-ref-4)
7. https://pengertianartidefinisidari.blogspot.com/2020/10/jaring-pengaman-sosial-jps-pengertian.html [↑](#footnote-ref-5)